



Analisis Kasus Kecurangan pada Bank Daerah Menggunakan Pendekatan Fraud Triangle : Investigasi Kasus Korupsi Iklan pada Bank BJB

Dian Rimayanti^{1*}, Prisca Trifena Puspita², Sinta Tri Hapsari³, Felisyta Natalia Purwanto⁴, Tries Ellia Sandari⁵

¹⁻⁵Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*dianrimayanti63@gmail.com¹, *priscatrifena@gmail.com², *sintatrihapsari13@gmail.com³,

*felisyanataliapurwanto01@gmail.com⁴, *triesellia@untag-sby.ac.id⁵

Alamat: Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi penulis: dianrimayanti@gmail.com

Abstract. *Fraud in the regional banking sector constitutes a serious threat that can result in state financial losses and erode public trust. This study aims to analyze the case of corruption in the advertising procurement at Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) using the Fraud Triangle Theory approach, which comprises three main elements: pressure, opportunity, and rationalization. The research employs a qualitative approach with a case study method, supported by a literature review from various relevant scientific sources. The results indicate that the Bank BJB case reflects the simultaneous interaction of the three elements of the Fraud Triangle. Pressure arises from the substantial need for non-budgetary funds in managing a promotional budget amounting to IDR 409 billion. Opportunity emerges due to weak internal control systems, the absence of adequate document verification, and irregularities in the procurement process. Rationalization is formed through the perpetrators' perception that such practices are common within bureaucratic and corporate environments. This study contributes to the development of both theoretical and practical understanding of fraud prevention in regional financial institutions in Indonesia, particularly through strengthening corporate governance and internal control systems.*

Keywords: *Fraud Triangle; Banking Fraud; Bank BJB; Forensic Accounting; Corruption*

Abstrak. Kecurangan (fraud) di sektor perbankan daerah merupakan ancaman serius yang dapat merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus korupsi pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) menggunakan pendekatan Fraud Triangle Theory yang mencakup tiga elemen utama: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, didukung oleh studi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus Bank BJB mencerminkan interaksi ketiga elemen Fraud Triangle secara simultan. Tekanan bersumber dari kebutuhan dana non-budgeter yang besar dalam pengelolaan anggaran promosi senilai Rp409 miliar. Kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, tidak adanya verifikasi dokumen yang memadai, serta penyimpangan dalam proses pengadaan. Rasionalisasi terbentuk melalui persepsi pelaku bahwa praktik tersebut merupakan hal yang lazim dalam lingkungan birokrasi dan korporasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman teoritis dan praktis terkait pencegahan fraud di lembaga keuangan daerah Indonesia, khususnya melalui penguatan tata kelola perusahaan dan sistem pengawasan internal.

Kata kunci: *Fraud Triangle; Kecurangan Perbankan; Bank BJB; Akuntansi Forensik; Korupsi*

1. LATAR BELAKANG

Kasus fraud atau kecurangan dalam sektor perbankan masih menjadi permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada lembaga keuangan daerah yang memiliki kompleksitas operasional dan pengawasan yang beragam. Perbankan daerah mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi regional melalui fungsi intermediasi keuangan, pengelolaan dana masyarakat, serta pembiayaan sektor produktif daerah. Sebagai lembaga kepercayaan publik, bank daerah dituntut menerapkan prinsip tata kelola perusahaan

yang baik (good corporate governance) guna menjaga integritas operasional dan stabilitas sistem keuangan. Namun demikian, kompleksitas aktivitas bisnis perbankan membuka peluang terjadinya penyimpangan, termasuk praktik kecurangan (fraud) yang melibatkan individu maupun kelompok dalam organisasi. Laporan keuangan sebagai media utama dalam menyampaikan informasi keuangan seharusnya menyajikan informasi yang relevan, andal, dan bebas dari salah saji material. Namun, dalam praktiknya, laporan keuangan sering dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk kepentingan tertentu melalui tindakan manipulasi atau kecurangan [1]. Fraud dalam laporan keuangan merupakan tindakan yang disengaja untuk menyesatkan pengguna laporan melalui pemalsuan dokumen, penghilangan informasi, atau penerapan prinsip akuntansi yang tidak sesuai. Dampak dari tindakan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. Sektor perbankan sendiri merupakan industri yang rentan terhadap fraud karena memiliki kompleksitas transaksi tinggi serta mengelola dana masyarakat yang berbasis kepercayaan [2].

Berbagai studi menunjukkan bahwa meskipun kecurangan laporan keuangan memiliki frekuensi yang relatif rendah, dampak kerugian yang ditimbulkan sangat besar dibandingkan jenis fraud lainnya [3]. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya fraud, salah satunya melalui Fraud Triangle Theory yang dikemukakan oleh Cressey. Teori tersebut menjelaskan jika kecurangan dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dalam mendorong individu melakukan tindakan kecurangan, baik karena tekanan finansial, lemahnya pengendalian internal, maupun pembenaran atas tindakan yang dilakukan [4].

Dalam konteks perbankan daerah, seperti Bank BJB, potensi terjadinya fraud menjadi isu yang penting untuk dikaji mengingat perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan daerah. Adanya berbagai indikasi kasus kecurangan di sektor perbankan menunjukkan bahwa pengawasan dan sistem pengendalian internal masih memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Selain itu, faktor-faktor seperti tekanan untuk mencapai target keuangan, kebutuhan finansial individu, serta lemahnya monitoring diduga menjadi pemicu utama terjadinya kecurangan laporan keuangan [1].

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh faktor-faktor Fraud Triangle yang meliputi tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perbankan daerah, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat menjelaskan kasus kecurangan

yang terjadi pada Bank BJB. Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran masing-masing elemen fraud triangle dalam mendorong terjadinya fraud pada sektor perbankan.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Akuntansi Forensik

2.1.1. Pengertian dan Konsep Dasar Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik merupakan disiplin ilmu yang mengintegrasikan pengetahuan akuntansi, auditing, dan kemampuan investigasi hukum untuk mengidentifikasi, menganalisis serta mengungkap kecurangan dalam suatu entitas. Akuntansi forensik memiliki peran yang strategis dalam mendukung pemberantasan korupsi dan kecurangan di lembaga keuangan, termasuk bank daerah. [5] dalam kajian sistematis mereka mengemukakan bahwa akuntansi forensik di era digital telah berkembang dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan, big data, dan kerangka analitik canggih untuk meningkatkan kemampuan deteksi kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik tidak lagi sekadar teknik pemeriksaan konvensional, melainkan telah berevolusi menjadi suatu metodologi investigatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. [6] menegaskan bahwa integrasi antara akuntansi forensik dan audit investigatif merupakan pendekatan yang paling efektif dalam mendeteksi fraud, terutama pada pengelolaan keuangan publik.

2.1.2. Ruang Lingkup dan Teknik Akuntansi Forensik

Ruang lingkup akuntansi forensik mencakup berbagai aktivitas investigatif yang bertujuan mengungkap kejahatan keuangan. [7] mengidentifikasi teknik-teknik utama dalam akuntansi forensik meliputi: (1) analisis dokumen keuangan, (2) wawancara investigatif, (3) penelusuran aset (*asset tracing*), (4) analisis forensik digital, dan (5) metode follow the money. Teknik-teknik ini menjadi alat fundamental bagi investigator dalam mengungkap skema kecurangan yang kompleks seperti yang terjadi pada kasus korupsi iklan Bank BJB.

[8] dalam tinjauan literturnya tentang akuntansi forensik untuk deteksi korupsi menemukan bahwa penerapan akuntansi forensik secara sistematis dapat mengidentifikasi pola-pola kecurangan yang tidak terdeteksi oleh audit konvensional. Sementara itu, [8] menegaskan bahwa peran akuntan forensik beserta teknik audit investigatif merupakan instrumen kunci dalam pengungkapan fraud di Indonesia, yang memberikan kontribusi nyata terhadap penegakan hukum di bidang keuangan.

2.2. Akuntansi Forensik dalam perbankan

Dalam bank daerah (BPD) di Indonesia, fungsi akuntansi forensik menjadi semakin relevan mengingat posisi bank daerah sebagai pengelola keuangan pemerintah daerah yang memiliki eksposur risiko yang unik. [9] meneliti implementasi akuntansi forensik dan audit investigatif dalam upaya pencegahan serta pengungkapan kecurangan pada pengelolaan keuangan daerah, dan menemukan bahwa penerapan yang optimal dari kedua instrumen ini secara signifikan meningkatkan kemampuan deteksi kecurangan. Temuan ini sejalan dengan pentingnya penguatan kapabilitas akuntansi forensik di bank bank daerah sebagai benteng pertahanan terhadap praktik korupsi.

2.3. Kecurangan (Fraud)

a. Konsep Fraud

Fraud atau kecurangan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan tidak sah melalui penipuan, penggelapan, atau manipulasi informasi keuangan. Fraud di sektor keuangan dan perbankan menempati posisi yang signifikan, dengan korupsi sebagai jenis fraud yang paling banyak menyebabkan kerugian. [9] menekankan bahwa fraud triangle theory merupakan pendekatan strategis yang efektif dalam mendeteksi korupsi dan kecurangan pada laporan keuangan publik, termasuk di lembaga keuangan milik negara. Hal ini menegaskan relevansi pendekatan teoritis dalam menganalisis kasus-kasus fraud di sektor publik Indonesia.

b. Fraud Triangle Theory

Fraud Triangle Theory pertama kali dikemukakan oleh Donald R. Cressey yang menjelaskan bahwa seseorang melakukan kecurangan karena adanya tiga elemen utama: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Ketiga elemen inilah yang membentuk segitiga kecurangan yang kemudian menjadi kerangka konseptual dominan dalam kajian fraud selama beberapa dekade. [10] dalam penelitian mereka pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa komponen-komponen fraud triangle secara signifikan berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan.

1) Tekanan (*Pressure*)

Tekanan merupakan elemen pertama dalam fraud triangle yang merujuk pada motivasi atau insentif seseorang untuk melakukan kecurangan. Tekanan ini dapat bersifat finansial, seperti kebutuhan mendesak akan uang, tekanan untuk mencapai target kinerja, atau gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan penghasilan. Dalam perbankan, tekanan dapat muncul

dari berbagai sumber, mulai dari tekanan korporasi untuk memenuhi target laba hingga tekanan politik dari pemegang saham mayoritas yang dalam hal bank daerah adalah pemerintah daerah. [10] dalam penelitian mereka pada Badan Usaha Milik Negara non-finansial di Indonesia menemukan bahwa tekanan keuangan (*financial pressure*) merupakan faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi indikasi fraud laporan keuangan. Demikian pula, [11] yang meneliti hubungan antara fraud triangle serta praktik manajemen laba pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia menyimpulkan bahwa tekanan sebagai proksi stabilitas keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan terjadinya tindakan kecurangan. Dalam kasus Bank BJB, tekanan untuk menyediakan dana non-budgeter bagi kegiatan politik pejabat daerah dapat diidentifikasi sebagai bentuk tekanan institusional yang mendorong terjadinya kecurangan.

2) Kesempatan (Opportunity)

Unsur kesempatan dalam kasus korupsi iklan Bank BJB termanifestasi dalam beberapa aspek. Pertama, lemahnya sistem pengawasan pengadaan barang dan jasa yang memungkinkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk menyusun dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak sesuai ketentuan tanpa terdeteksi. Kedua, tidak dilakukannya verifikasi dokumen penyedia oleh panitia pengadaan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku. Ketiga, adanya post-bidding dalam proses evaluasi penawaran yang mencerminkan manipulasi proses seleksi agensi. Ketiadaan mekanisme check and balance yang efektif dalam proses pengadaan iklan membuka ruang seluas-luasnya bagi para pelaku untuk merancang dan mengeksekusi skema kickback [12].

3) Rasionalisasi (Rationalization)

Unsur rasionalisasi dalam kasus ini dapat dianalisis melalui konstruksi skema yang dirancang seolah-olah merupakan transaksi bisnis yang sah antara bank dan agensi iklan. Para tersangka diduga merasionalisasi tindakan mereka dengan menganggap bahwa penggunaan dana non-budgeter merupakan bagian dari praktik bisnis yang lazim di lingkungan korporasi dan pemerintahan daerah, atau bahwa hal tersebut merupakan bagian dari "kewajiban" bank kepada pemegang saham mayoritas. [12] menemukan bahwa lingkungan organisasi yang permisif terhadap penyimpangan memperkuat mekanisme rasionalisasi pelaku fraud. [13] menegaskan bahwa dalam kasus-kasus fraud yang melibatkan kolusi antara pejabat senior, rasionalisasi seringkali diperkuat oleh adanya "kesepakatan bersama" di antara para pelaku yang saling memberikan legitimasi terhadap tindakan mereka masing-masing.

4) Kerangka Teoritis Penelitian

Berdasarkan uraian grand teori akuntansi forensik dan middle theory fraud yang telah dikaji, penelitian ini mengembangkan kerangka teoritis yang mengintegrasikan keduanya untuk menganalisis kasus korupsi iklan Bank BJB. Akuntansi forensik berperan sebagai grand theory yang memberikan landasan metodologis dan konseptual untuk investigasi kecurangan, sementara fraud triangle theory sebagai middle theory menyediakan kerangka analitik untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi.

Ketiga elemen fraud triangle, yakni tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, digunakan sebagai lensa analitik untuk mengurai bagaimana kasus korupsi iklan Bank BJB dapat terjadi dan berlangsung selama 2,5 tahun tanpa terdeteksi oleh mekanisme pengawasan internal. Pemahaman yang komprehensif terhadap ketiga elemen ini, didukung oleh teknik-teknik akuntansi forensik dalam menginterpretasikan bukti-bukti transaksi keuangan, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam upaya pencegahan fraud di bank daerah Indonesia di masa mendatang.

5) Fraud dalam Sektor Perbankan

Sektor perbankan termasuk salah satu sektor yang rentan terhadap praktik kecurangan (fraud), mengingat kompleksitas aktivitas operasionalnya, tingginya volume transaksi, serta besarnya dana yang dikelola. Karakteristik tersebut menciptakan berbagai titik rawan dalam sistem organisasi yang berpotensi dimanfaatkan dalam melakukan tindakan fraud, baik yang berupa rekayasa laporan keuangan maupun penyimpangan dalam aktivitas operasional.

Dalam sektor perbankan kecurangan dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bentuk kerugian keuangan, tetapi juga berimplikasi terhadap penurunan tingkat kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan. Kecurangan laporan keuangan tergolong sebagai bentuk fraud yang menimbulkan dampak paling signifikan karena dapat memengaruhi kualitas informasi yang menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan [2].

Faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud adalah terdapat kelemahan didalam sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian yang tidak efektif, termasuk pengawasan yang kurang optimal, membuka peluang bagi individu dalam organisasi untuk melakukan tindakan penyimpangan tanpa terdeteksi secara dini. Penelitian [14] menegaskan bahwa ineffective monitoring merupakan salah satu faktor dominan yang meningkatkan risiko terjadinya kecurangan dalam organisasi perbankan.

Tekanan juga berperan dalam mendorong terjadinya kecurangan. Tekanan tersebut dapat berasal dari tuntutan pencapaian target kinerja, kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas keuangan, maupun tekanan eksternal dari pihak pemangku kepentingan. Financial target dan tekanan organisasi memiliki pengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan laporan keuangan [1]. Dan rasionalisasi menjadi faktor yang memperkuat tindakan kecurangan melalui pembenaran yang dilakukan oleh pelaku. Individu cenderung beranggapan tindakan yang dilakukan sebagai hal yang wajar atau dapat diterima dalam kondisi tertentu. Rasionalisasi berperan dalam membentuk persepsi pelaku terhadap kecurangan, sehingga mengurangi rasa bersalah atas tindakan yang dilakukan [15].

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kecurangan (fraud) yang terjadi pada Bank BJB, khususnya terkait faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan.

Metode studi kasus digunakan untuk menganalisis suatu kasus secara mendalam dan kontekstual, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana dan mengapa kecurangan dapat terjadi dalam organisasi perbankan.

Dalam penelitian ini, pendekatan Fraud Triangle digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji faktor tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) dalam kasus kecurangan yang diteliti.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur. Studi literatur merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data yang digunakan meliputi studi literatur yang membahas kecurangan, seperti:

- a. Jurnal ilmiah
- b. Buku referensi
- c. Laporan penelitian, serta
- d. Publikasi lain

Melalui studi literatur, peneliti memperoleh landasan teoritis, kerangka konseptual, serta temuan penelitian terdahulu yang digunakan untuk mendukung analisis terhadap kasus kecurangan pada Bank BJB. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara komprehensif berdasarkan perspektif teoritis dan empiris yang telah berkembang dalam literatur ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Hasil	Persamaan dengan artikel	Perbedaan dengan artikel
1.	Nur Shihatus Sakinah, Pratomo Cahyo Kurniawan, Imahda Khoiri Furqon & Ina Mutmainah (2023). Peran Akuntan Forensik dan Teknik Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud di Indonesia.	Akuntan forensik berperan penting dalam mendeteksi fraud; perannya lebih menonjol di sektor publik dibanding swasta	Sama-sama membahas peran akuntansi forensik dan audit investigatif dalam mengungkap fraud; sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur; konteks fraud di sektor publik atau lembaga keuangan.	Jurnal tidak menggunakan Fraud Triangle sebagai kerangka analisis, sedangkan penelitian ini menjadikannya kerangka utama.
2.	Rudy Hartanto & Dwi Rahayu (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi Menggunakan Teori Fraud Triangle: Pendekatan Studi Kasus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecurangan terjadi karena: Tekanan (kebutuhan finansial, tuntutan gaya hidup) Kesempatan (lemahnya pengendalian internal) Rasionalisasi (pembenaran tindakan fraud) Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama mendorong terjadinya tindakan korupsi.	Menggunakan Fraud Triangle Theory (Cressey) dan membahas penyebab fraud dari sisi perilaku individu dan organisasi	Penelitian ini fokus pada kasus korupsi individu (non-perbankan), sedangkan artikel fokus pada fraud di perbankan daerah (Bank BJB)

3.	Bambang Leo Handoko (2021)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa collusion berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud, sementara financial target, external pressure, ineffective monitoring, change in auditor, change in director, dan frequent tidak berpengaruh, menyimpulkan fraud hexagon kurang efektif kecuali collusion, serta merekomendasikan penguatan internal control untuk perbankan nasional.	Keduanya fokus pada sektor perbankan, pembahasan elemen pressure (target finansial vs tekanan iklan) dan opportunity (ineffective monitoring vs lemah pengawasan), serta implikasi pencegahan fraud melalui penguatan pengawasan internal, meskipun keduanya menyoroti kerugian finansial dan reputasi di industri krusial ini.	Penelitian ini lebih umum untuk deteksi auditor, dan mencakup fraud hexagon 7 elemen. Jenis fraud pada penelitian ini yaitu manipulasi laporan keuangan, sedangkan artikel menggunakan fraud triangle dengan jenis fraud korupsi operasional iklan
4.	Kiswah Nurma Awaliah (2023). Fraud Triangle Theory: Pendekatan Strategis dalam Mendeteksi Korupsi dan Kecurangan pada Laporan Keuangan Publik.	Penerapan Fraud Triangle (tekanan, kesempatan, rasionalisasi) efektif mendeteksi korupsi; pengendalian internal dan transparansi menjadi faktor kunci pencegahan	Sama-sama menggunakan Fraud Triangle Theory (Cressey) sebagai landasan analitis; sama-sama membahas korupsi di lembaga keuangan publik; sama-sama merekomendasikan penguatan pengendalian internal dan transparansi	Jurnal ini bersifat konseptual-strategis (tidak menganalisis kasus nyata), sedangkan artikel menganalisis kasus korupsi iklan Bank BJB secara mendalam. Jurnal membahas laporan keuangan publik secara umum, penelitian ini spesifik pada fraud pengadaan barang/jasa.
5.	Bobby Hartadhy Toeweh (2023). Literature Review: Akuntansi Forensik untuk Deteksi Korupsi.	Akuntansi forensik efektif mendeteksi dan mengungkap fraud dana Covid-19 di pemerintah daerah melalui reviu dan audit	Sama-sama membahas akuntansi forensik sebagai instrumen deteksi korupsi di lingkup pemerintahan/keuangan daerah; sama-sama	Jurnal fokus pada deteksi korupsi dana Covid-19 di pemerintah daerah, sedangkan Penelitian ini

		investigatif; tidak terdeteksi oleh audit konvensional.	menekankan bahwa audit konvensional tidak cukup untuk mengungkap fraud; penggunaan metode kualitatif deskriptif.	fokus pada fraud pengadaan iklan di bank daerah (Bank BJB). Jurnal tidak menggunakan Fraud Triangle sebagai kerangka analisis
6.	Yudhi Prasetyo, Diky Paramitha, Etik Ipda Riyani & Faizul Mubarak (2023). Integrasi Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Fraud: Studi Literatur.	Akuntansi forensik dan audit investigatif terbukti kolaboratif dan efektif dalam mendeteksi fraud; audit investigatif mengungkap fraud, akuntansi forensik menyediakan bukti hukum yang valid di pengadilan.	Sama-sama menekankan integrasi akuntansi forensik dan audit investigatif; sama-sama menggunakan studi literatur sebagai metode; sama-sama menyoroti pentingnya pengungkapan fraud di sektor keuangan publik.	Jurnal menggunakan metode literature review murni tanpa analisis kasus, sedangkan artikel menggunakan studi kasus spesifik Bank BJB. Jurnal mencakup berbagai jenis fraud (KKN, manipulasi laporan, pencucian uang), penelitian ini berfokus pada fraud pengadaan iklan.
7.	Recky Vincent Oktaviano Wuysang, Grace Nangoi & Winston Pontoh (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pencegahan dan Pengungkapan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.	Akuntansi forensik efektif secara preventif melalui FCP, SPIP, SIMDA dan efektif secara detektif melalui audit operasional dan forensik komputer	Sama-sama mengkaji fraud dalam pengelolaan keuangan daerah; sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam; sama-sama merekomendasikan penguatan pengawasan internal lembaga keuangan daerah	Jurnal mengkaji BPKP Sulawesi Utara sebagai lembaga pengawas, sedangkan artikel mengkaji Bank BJB sebagai pelaku keuangan daerah. Jurnal tidak menggunakan Fraud Triangle, penelitian menggunakannya sebagai kerangka analitis utama.

8.	Winda Wulandari, Retna Sari, Heksawan Rahmadi, Wiely Menanda & Dwi Prastowo (2026).	Fraud Triangle masih menjadi teori dominan namun kini diintegrasikan dengan kerangka digital; diperkenalkan model Forensic Accounting 4R yang menekankan sinergi teknologi, etika, dan tata kelola.	Sama-sama menjadikan Fraud Triangle Theory sebagai landasan teori yang dominan; sama-sama menggunakan metode kualitatif (SLR/studi literatur); sama-sama menekankan pentingnya tata kelola dan pengawasan dalam pencegahan fraud	Jurnal berfokus pada dimensi digital dan teknologi (Big Data, AI) dalam akuntansi forensik, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis kasus fraud konvensional (pengadaan iklan). Jurnal bersifat makro dan sistematis lintas studi, penelitian bersifat mikro pada satu kasus
9.	Nunung Nurhayati Pengaruh Fraud Hexagon terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2018–2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan eksternal, pergantian direksi, kualitas auditor eksternal, dan rangkap jabatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan, sedangkan koneksi politik dan pergantian auditor tidak berpengaruh signifikan.	Penelitian ini memiliki persamaan dimana keduanya sama-sama membahas kecurangan pada sektor perbankan dan menggunakan dasar teori fraud triangle	Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan teori yang digunakan serta metode penelitian, di mana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis pengujian hipotesis, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus pada Bank BJB untuk mengungkap secara rinci bagaimana

				kecurangan terjadi.
10.	Mardianto dan Carissa (2019) Analisis Pengaruh Fraud Triangle Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua elemen fraud triangle berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Variabel perubahan aset (ACHANGE) dan pergantian auditor (AUDCHANGE) terbukti berpengaruh signifikan positif, sedangkan leverage, return on assets (ROA), dan ineffective monitoring tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fraud triangle digunakan sebagai dasar teori, dalam praktiknya tidak semua faktor secara konsisten memicu terjadinya kecurangan	Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan fraud triangle untuk menganalisis kecurangan	Metode dan fokus penelitian, di mana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendeteksi kemungkinan fraud, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mengkaji secara mendalam terjadinya kecurangan pada Bank BJB.

4.2. Pembahasan

a. Gambaran Umum Kasus Korupsi Iklan Bank BJB

Kasus korupsi pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) merupakan salah satu kasus fraud perbankan daerah terbesar yang terungkap pada tahun 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka pada 13 Maret 2025. Kelima tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR), Pimpinan Divisi Corporate Secretary

sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Widi Hartoto (WH), serta tiga pengendali agensi iklan yaitu Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Raden Sophan Jaya Kusuma [16].

Berdasarkan konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, kasus ini bermula dari realisasi belanja promosi umum dan produk bank tahun anggaran 2021–2023 yang dikelola oleh Divisi Corporate Secretary Bank BJB. Dari total anggaran Rp409 miliar. Sekitar Rp100 miliar yang direalisasikan sesuai pekerjaan nyata di media. Selisih sebesar Rp222 miliar tidak mengalir ke media secara riil, melainkan dijadikan dana non-budgeter yang dikendalikan oleh para tersangka [16].

Pada pelaksanaan pengadaan ini, PPK diduga melanggar ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain dengan menyusun dokumen HPS bukan berupa nilai pekerjaan melainkan fee agensi, guna menghindari lelang. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [16].

Selama proses penyidikan, tim KPK setidaknya sudah menggeledah 12 tempat. Dua di antaranya adalah rumah kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Kantor BJB di Bandung [17]. KPK menindaklanjuti dugaan mengenai penggunaan dana non-budgeter yang dikelola Divisi Corporate Secretary Bank BJB senilai Rp200 miliar mengalir ke mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. KPK juga mengambil alih aset sebagai bagian dari proses penyitaan sejumlah aset milik Ridwan Kamil diduga bersumber dari dana non-budgeter tersebut. Adapun, pada 10 Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, dan turut menyita barang bukti elektronik, mobil Mercedes Benz, dan motor Royal Enfield hitam tipe Classic 500 Limited Edition [18].

b. Analisis Elemen Tekanan (Pressure) pada Kasus Bank BJB

Dalam Fraud Triangle Theory yang dikemukakan Cressey (1953) dan diadopsi dalam SAS No. 99, tekanan (pressure) adalah factor yang mendorong individu melakukan keterlibatan dalam kecurangan akibat ketidakmampuan memenuhi tuntutan tertentu. Tekanan ini bisa berasal dari kebutuhan finansial, tuntutan jabatan, target kinerja, maupun kepentingan pribadi.

Dalam perspektif Fraud Triangle, elemen tekanan (*pressure*) pada kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB terlihat dari kombinasi faktor organisasi dan individu. Kasus ini bermula dari pengelolaan anggaran promosi yang sangat besar, yakni sekitar Rp409 miliar pada periode 2021–2023, yang menimbulkan tekanan untuk merealisasikan program promosi sekaligus menjaga citra perusahaan. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya penyimpangan berupa pengadaan iklan fiktif yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp222 miliar [16];[17];[19]. Besarnya selisih tersebut mengindikasikan adanya tekanan untuk menyediakan dana non-budgeter di luar mekanisme resmi, yang kemudian mendorong manipulasi dalam proses pengadaan.

Tekanan ini diperkuat oleh posisi para pelaku yang memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan keputusan, sehingga membuka ruang penyalahgunaan jabatan, seperti penunjukan agensi tanpa prosedur yang semestinya. Lebih lanjut, lemahnya pengendalian internal dan tidak optimalnya penerapan prosedur pengadaan turut menciptakan tekanan sistemik yang memfasilitasi terjadinya kecurangan. Kasus ini menunjukkan adanya indikasi praktik *kickback* atau imbalan ilegal dalam proses pengadaan agensi periklanan, yang diduga telah dirancang sejak awal [16]. Dalam kasus ini, proses pengadaan dilaporkan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku, seperti tidak dilakukannya verifikasi yang memadai dan adanya penghindaran mekanisme lelang [19].

Kondisi ini mencerminkan tekanan dari pihak eksternal yang memiliki kuasa atas kebijakan bank, sehingga pimpinan bank merasa terdorong bahkan tertekan untuk memenuhi kebutuhan dana di luar jalur resmi. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa karyawan atau pimpinan bank mencari peluang untuk melakukan kecurangan demi menghilangkan tekanan finansial atau non-finansial yang bersifat personal maupun institusional [20].

Dengan demikian, elemen tekanan dalam kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, mulai dari tuntutan pengelolaan anggaran besar, kebutuhan dana non-budgeter, kepentingan pribadi, tekanan jabatan, hingga kelemahan lingkungan organisasi. Kombinasi tekanan tersebut menjadi faktor krusial yang mendorong terjadinya fraud.

c. Analisis Elemen Kesempatan (Opportunity) pada Kasus Bank BJB

Dalam perspektif *Fraud Triangle*, elemen kesempatan (*opportunity*) pada kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB semakin terlihat jelas dari temuan awal hingga perkembangan terbaru tahun 2026. Kesempatan muncul akibat lemahnya pengendalian internal dan

penyimpangan dalam proses pengadaan, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa penunjukan agensi dilakukan tidak sesuai prosedur, bahkan diduga sengaja diatur untuk menghindari mekanisme lelang melalui rekayasa dokumen dan nilai pekerjaan [16]. Panitia pengadaan juga mengabaikan proses verifikasi dokumen dalam pelaksanaan pengadaan secara memadai serta melakukan praktik *post bidding*, sehingga membuka ruang manipulasi sejak tahap awal proses pengadaan [16].

Kesempatan tersebut semakin besar karena lemahnya pengawasan terhadap realisasi pekerjaan. Dalam praktiknya, agensi hanya berperan sebagai perantara penempatan iklan, namun terdapat selisih pembayaran hingga Rp222 miliar antara dana yang dibayarkan oleh bank dan yang diteruskan ke media, yang kemudian digunakan sebagai dana non-budgeter [16]. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme monitoring dan evaluasi tidak berjalan efektif, sehingga kegiatan fiktif atau mark-up tidak terdeteksi sejak awal. Perkembangan terbaru tahun 2026 juga memperkuat adanya celah kesempatan ini, di mana penyidik masih terus melakukan pemeriksaan berulang terhadap saksi dan mendalami aliran dana yang sulit dilacak, menandakan kompleksitas skema dan lemahnya sistem pencatatan serta transparansi keuangan dalam kasus ini [21].

Indikasi praktik pencucian uang (*money laundering*) juga memperlihatkan bagaimana kesempatan dimanfaatkan untuk menyamarkan aliran dana hasil korupsi. KPK mengungkap bahwa dana non-budgeter diduga dialirkan ke berbagai pihak, termasuk melalui pihak ketiga untuk menyulitkan pelacakan transaksi [22]. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya terdapat celah dalam sistem pengadaan, tetapi juga dalam pengawasan aliran keuangan setelah dana dicairkan. Dengan demikian, elemen kesempatan dalam kasus ini terbentuk dari kombinasi kelemahan prosedur pengadaan, minimnya verifikasi dan pengawasan, serta tidak transparannya aliran dana, yang secara keseluruhan memungkinkan terjadinya fraud secara terstruktur dan berkelanjutan.

d. Analisis Elemen Rasionalisasi (Rationalization) pada Kasus Bank BJB

Dalam teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey, rasionalisasi (*rationalization*) merupakan proses kognitif di mana pelaku membenarkan tindakan kecurangan agar tetap selaras dengan nilai moral pribadinya. Rasionalisasi menjadi elemen penting karena tanpa adanya pembenaran, individu cenderung sulit melakukan tindakan fraud. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku fraud selalu memiliki alasan tertentu untuk mengurangi rasa bersalah, seperti merasa tindakan tersebut wajar atau dilakukan demi kepentingan tertentu [DJPB Kemenkeu].

Konstruksi perkara yang diungkap dalam pemberitaan [17] menunjukkan adanya manipulasi dalam proses pengadaan, seperti pengaturan pemenang proyek serta penyusunan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam konteks ini, rasionalisasi muncul melalui anggapan bahwa praktik tersebut merupakan hal yang umum terjadi dalam lingkungan birokrasi atau korporasi, serta adanya persepsi bahwa dana yang digunakan bersifat fleksibel dan tidak akan menimbulkan konsekuensi serius. Pemberitaan [19] juga menegaskan bahwa sebagian dana iklan bersifat fiktif, yang memperkuat indikasi bahwa tindakan kecurangan dilakukan secara sadar namun tetap dibenarkan oleh pelaku. Temuan ini sejalan dengan kajian dalam jurnal yang digunakan, yang menyatakan bahwa rasionalisasi sering kali dipengaruhi oleh budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan serta adanya legitimasi kolektif antar pelaku yang saling memperkuat pembenaran tindakan fraud.

e. Integrasi Fraud Triangle: Ketiga Elemen Saling Memperkuat

Secara terintegrasi menggunakan Fraud Triangle, kasus Bank BJB menunjukkan bahwa kecurangan terjadi akibat interaksi yang kuat antara tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Tekanan dalam kasus ini diduga berasal dari kebutuhan untuk memenuhi kepentingan tertentu, baik yang bersifat finansial maupun institusional. Kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa yang memungkinkan manipulasi dokumen dan pengaturan tender. Sementara itu, rasionalisasi berperan sebagai mekanisme psikologis yang membuat pelaku merasa bahwa tindakan mereka dapat diterima.

Ketiga elemen ini saling memperkuat, di mana tekanan mendorong niat untuk melakukan kecurangan, kesempatan memberikan ruang untuk melaksanakannya, dan rasionalisasi menghilangkan rasa bersalah. Hal ini sejalan dengan teori Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Cressey, serta didukung oleh penelitian dalam jurnal yang menyatakan bahwa kombinasi ketiga elemen tersebut secara simultan meningkatkan potensi terjadinya fraud, khususnya dalam sektor perbankan yang memiliki kompleksitas operasional tinggi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menganalisis kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB menggunakan pendekatan Fraud Triangle Theor dan menyimpulkan bahwa kecurangan terjadi akibat interaksi simultan ketiga elemennya. Elemen tekanan (pressure) bersumber dari pengelolaan anggaran promosi senilai Rp409 miliar yang mendorong penyediaan dana non-budgeter di luar mekanisme resmi, diperkuat oleh kepentingan politik pemegang saham mayoritas dari unsur pemerintah daerah. Elemen kesempatan (opportunity) muncul dari lemahnya sistem pengendalian internal, manipulasi dokumen HPS, tidak adanya verifikasi pengadaan yang memadai, serta praktik post-bidding yang memungkinkan kerugian negara sebesar Rp222 miliar tanpa terdeteksi selama lebih dari dua tahun. Elemen rasionalisasi (rationalization) terbentuk melalui persepsi kolektif para pelaku bahwa praktik dana non-budgeter merupakan hal yang lazim dalam lingkungan birokrasi, sehingga legitimasi tindakan fraud terjaga melalui kesepakatan bersama antar pihak yang terlibat.

Kasus ini membuktikan bahwa fraud perbankan bukan sekadar persoalan individu, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola organisasi. Ketiga elemen Fraud Triangle saling memperkuat: tekanan mendorong niat, kesempatan membuka jalan pelaksanaan, dan rasionalisasi menghilangkan hambatan moral pelaku. Temuan penelitian ini selaras dengan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa kombinasi simultan ketiga elemen tersebut secara signifikan meningkatkan potensi terjadinya fraud, khususnya di sektor perbankan daerah yang memiliki kompleksitas operasional tinggi dan pengawasan yang beragam.

Sebagai implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) melalui peningkatan efektivitas audit internal yang independen, penerapan e-procurement yang transparan dan dapat diaudit secara real-time, serta pengembangan sistem whistleblowing yang memberikan perlindungan nyata bagi pelapor. Selain itu, pembangunan budaya integritas organisasi dan penguatan peran dewan pengawas dalam menjaga akuntabilitas keuangan sangat diperlukan guna mencegah terulangnya praktik kecurangan serupa di lembaga keuangan daerah Indonesia di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Z. A. P. Putri and A. H. D. Nugroho, "PENGARUH FRAUD TRIANGLE TERHADAP DETEKSI KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN PADA PERBANKAN KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA TAHUN 2015-2019," *J. Indones. Sos. Teknol.*, vol. 2, no. 10, pp. 1872–1891, 2021.
- M. Noviesta, Khusnatul, and I. F. Ulfah, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDETEKSIAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PENDEKATAN FRAUD TRIANGLE (Studi Kasus Lembaga Keuangan Perbankan di BEI Periode 2017-2021)," *SENTRI J. Ris. Ilm.*, vol. 2, no. 3, pp. 829–842, 2023.
- N. Hayati, Gunarianto, and E. Puspitosarie, "PENGARUH PERSPEKTIF FRAUD TRIANGLE DALAM UPAYA MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)," *CALL Pap.*, 2019.
- R. Hartanto and D. Rahayu, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Menggunakan Teori Fraud Triangle: Pendekatan Studi Kasus Analysis of Factors Influencing Corruption Using The Fraud Triangle Theory : A Case Study Approach," *IJBEM Indones. J. Bus. Econ. Manag.*, vol. 3, no. 1, pp. 27–33, 2023.
- W. Wulandari, R. Sari, H. Rahmadi, W. Menanda, and D. Prastowo, "Akuntansi Forensik di Era Digital: Sintesis Sistematis atas Integrasi Big Data, AI, dan Kerangka Analitik dalam Deteksi Kecurangan (2016 – 2025)," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–9, 2026, doi: 10.54259/akua.v5i1.5838.
- Y. Prasetyo, D. Paramitha, E. I. Riyani, and F. Mubarak, "Integrasi Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Fraud: Studi Literatur," *J. Buana Akunt.*, vol. 8, no. 1, pp. 16–29, 2023, doi: 10.36805/akuntansi.v8i1.3062.
- R. V. O. Wuysang, G. Nangoi, and W. Pontoh, "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENGUNGKAPAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA," *J. Ris. Akunt. dan Audit.*, vol. 2, no. 23, pp. 31–53, 7AD.
- B. H. Toeweh, "Literature Review: Akuntansi Forensik Untuk Deteksi Korupsi (Forensic Accounting for Corruption Detection: A Literature Review)," *Stud. Akuntansi, Keuangan, dan Manaj.*, vol. 2, no. 2, pp. 135–146, 2023.
- K. Tauhid and K. N. Awaliah, "FRAUD TRIANGLE THEORY: PENDEKATAN STRATEGIS DALAM MENDETEKSI KORUPSI DAN KECURANGAN PADA LAPORAN," *Karimah Tauhid*, vol. 2, no. 5, pp. 1493–1506, 2023.
- A. Rahman, D. Deliana, and D. Gopas, "PENDETEKSIAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN ANALISIS FRAUD TRIANGLE PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA," *Kaji. Akunt.*, vol. 22, no. 1, pp. 9–19, 2021.
- N. Putu, D. Rosalina, H. Narsa, L. Mega, E. Afifa, and O. Ari, "Fraud triangle and earnings management based on the modified M-score: A study on manufacturing company in Indonesia," *Heliyon*, vol. 9, no. 2, p. e13649, 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e13649.
- P. Bangar and H. Sianipar, "Factors Influencing the Occurrence of Fraud: Employee Perceptions in the HG Business Group," *Account. J. BINANIAGA*, vol. 07, no. 01, pp. 71–88, 2024, doi: 10.33062/ajb.v7i1.494.
- M. I. Lestari and V. Florensi, "Deteksi Fraudulent Financial Statement: Pengujian Dengan Analisis Proksi Fraud Triangle," *J. Bina Akunt.*, vol. 9, no. 1, pp. 107–125, 2022.
- A. Irawan and I. A. Nursanty, "ANALISIS DETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DALAM DIMENSI FRAUD TRIANGLE," *J. Ilm. Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 21–28, 2023.
- D. Wirianto, "Integrasi Fraud Diamond dan Akuntansi Perilaku dalam Perbankan," *J. Ekon.*,

- vol. 16, no. 3, pp. 433–446, 2025.
- KPK, “KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Pengadaan Iklan di Bank BJB,” 2025.
- CNN, “Konstruksi Lengkap Kasus Bank BJB Rugikan Negara Rp222 Miliar,” 2025. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250313175518-12-1208557/konstruksi-lengkap-kasus-bank-bjb-rugikan-negara-rp222-miliar>
- H. P. Sari and J. Carina, “KPK Usut Dugaan Dana Nonbudgeter Bank BJB Rp 200 M Mengalir ke Ridwan Kamil,” Kompas.
- Tempo, “Kasus Korupsi Dana Iklan Bank BJB, Dari Anggaran Rp 409 Miliar Ada Rp 222 Miliar yang Fiktif,” 2025. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/hukum/kasus-korupsi-dana-iklan-bank-bjb-dari-anggaran-rp-409-miliar-ada-rp-222-miliar-yang-fiktif-1219914>
- D. Ratmono and Frendy, “Examining the fraud diamond theory through ethical culture variables : A study of regional development banks in Indonesia,” *Cogent Bus. Manag.*, vol. 9, no. 1, pp. 1–18, 2022, doi: 10.1080/23311975.2022.2117161.
- R. R. I. (RRI), “KPK Periksa Tiga Tersangka Pengadaan Iklan Bank BJB,” 2026. [Online]. Available: https://rri.co.id/hukum/hukum/2356832/kpk-periksa-tiga-tersangka-pengadaan-iklan-bank-bjb?utm_source=chatgpt.com
- M. Indonesia, “Modus Uang Korupsi ke ‘Teman Wanita’ Dibongkar KPK, Kasus Bank BJB dan Ridwan Kamil Kembali jadi Sorotan Tajam,” 2026. [Online]. Available: https://monitorindonesia.com/hukum/read/2026/04/624256/modus-uang-korupsi-ke-teman-wanita-dibongkar-kpk-kasus-bank-bjb-dan-ridwan-kamil-kembali-jadi-sorotan-tajam?utm_source=chatgpt.com